

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *WHITE COLLAR CRIME*¹

Oleh : Clinton Trivo Laoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa yang tergolong sebagai tindak pidana *white collar crime* dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *white collar crime*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam *white collar crime* atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain: Korupsi; Penyuapan; Penghindaran/penggelapan Pajak; Penipuan dan Terorisme. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku *white collar crime* adalah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yang pada umumnya terdapat pengaturannya di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat di luar KUHP. Apabila kejahatan korupsi maka akan ditindaki sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Apabila kejahatan profesi akan diterapkan UU No. 29 Tahun 2004 untuk profesi dokter, UU No. 48 Tahun 2009 untuk profesi Hakim, KUHP untuk profesi Pengacara dan Wartawan, kejahatan individual sesuai dengan KUHP.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, *White Collar Crime*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara kita, yang namanya kejahatan kerah putih atau *white collar crime* sudah menjadi berita biasa yang sering didengar, dilihat dan dialami. Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* di negara yang tidak pernah

jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat ditandai dengan lemahnya tampilan penegak hukum di tanah air. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang endemik dan sistemik di negara kita adalah produk dari lemahnya tampilan penegak hukum. Hukum dengan mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi.³

White collar crime (kejahatan kerah putih) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang terhormat di masyarakat. *White collar crime* ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, dimana pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang rendah. Pelaku *white collar crime* meliputi kalangan pengusaha, pejabat dan kalangan profesional. Contoh-contoh dari *white collar crime* antara lain malpraktek oleh dokter, pengacara atau notaris, korupsi di kalangan pejabat, kolusi penguasa dengan pengusaha, iklan yang menyesatkan, persaingan curang, manipulasi pajak, makanan dan obat-obatan yang membahayakan lingkungan.⁴ Modus operandi dari kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang.

Munir Fuady mengatakan bahwa suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.⁵

³ Fransiska Novita Eleanora, *White Collar crime Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Online Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id> pada tanggal 25 Agustus 2019.

⁴ Hanafi, *Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime*, diakses dari www.researchgate.net pada tanggal 24 Agustus 2019

⁵ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101095

Eksistensi *white collar crime* yang lain yang lain adalah kejahatan korporasi. Kejahatan jenis ini sangat jarang berlanjut ke meja hijau ranah pidana.

Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* terkait dengan jabatan yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatannya tersebut. Simbol 'kerah putih' ini menandakan adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum (korporasi). Seseorang yang memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya, kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya, karena sifatnya yang melebur dalam sistem, sehingga korban dan publik tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Seperti modus yang dilakukan Melinda, yang memanfaatkan kepercayaan nasabah kelas premium yang menjadi kliennya. Tanpa disadari pemilik dana, Melinda telah mengalihkan dana-dana mereka melalui transaksi fiktif.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Tindak pidana apa yang tergolong sebagai tindak pidana *white collar crime*?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *white collar crime*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁶ *Kejahatan Kerah Putih (white collar crime)*, diakses dari alfariqnut.blogspot.com pada tanggal 18 Agustus 2019, hlm 1.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Tergolong Sebagai Tindak *White Collar Crime*

Suatu kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama, yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu mencakup perbuatan yang anti-sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur dalam hukum pidana.⁷

Dalam memahami kejahatan kerah putih, diperlukan pengetahuan terkait tipologi pelaku kejahatan tersebut. Sebab, definisi terkait suatu tindak kejahatan dapat di golongkan kedalam *white collar crime*, atau tidak, dapat dilihat berdasarkan tipologi pelakunya, sebagai berikut:⁸

1. Tipologi pertama, dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki.
2. Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai *white collar crime* dalam lingkup *cyber crime*.
3. Tipologi ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok.

Dari 3 (tiga) tipologi yang disebutkan di atas, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain:⁹

1. Korupsi

Tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak jauh dari yang namanya posisi yang tinggi dalam sebuah lembaga negara atau sebuah perusahaan. apabila tindak

⁷ alfariqnut.blogspot.com, *Op-Cit*.

⁸ Dwita Komala Santi, *Kejahatan Kerah Putih (white Collar crime)* di Asia, diakses dari medium.com pada tanggal 18 Agustus 2019.

⁹ *Ibid*.

pidana korupsi terjadi pada lembaga kenegaraan seperti DPR atau MPR, maka terlihat jelas rakyatlah yang dirugikan disini, uang yang selama ini dikumpulkan dalam bentuk pajak, dalam bentuk retribusi, hilang begitu saja karena digelapkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Secara yuridis, pengertian korupsi baik arti maupun jenisnya diatur didalam tiga puluh (30) pasal dan telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perorangan.

2. Penyuapan

Penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.¹⁰ Dalam Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.¹¹

Penyuapan di dalam UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap didefinisikan sebagai tindakan 'memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, juga menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.¹²

3. Penggelapan/penghindaran pajak

Penghindaran pajak atau *tax evasion* atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.¹³ Menurut Hutami (2010), *tax avoidance* merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.¹⁴ Penggelapan pajak (*tax avasion*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang berlaku. *Tax avasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax avasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Penipuan

Pasal 378 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

¹⁰ *Penyuapan, Tindakan Pelanggaran Hukum*, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 dari id.m.wikipedia.org

¹¹ *What's is Bribery, Black's Law Dictionary*, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019

¹² UU No. 11 Tahun 1980 tentang *Tindak Pidana Suap*.

¹³ *Tax evasion*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 24 Agustus 2019

¹⁴ Hestanto, *Penghindaran Pajak atau Perlawanan Terhadap Wajib Pajak*, diakses dari www.Hestanto.web.id pada tanggal 24 Agustus 2019

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵ Berdasar bunyi pasal ini, secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif delik, berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal UU dengan kata-kata: 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum' dan
2. Unsur Obyektif delik, yang terdiri atas:
 - a. Unsur barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang, dan
 - b. Unsur cara mengerakkan orang lain, yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/rangkaian kebohongan.

4. Terorisme

Berkaitan dengan tindak *white collar crime*, maka didalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur antara lain dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 adalah merupakan tindak pidana terorisme sebagai tindak *white collar crime*, karena perbuatan-perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial yang lebih rendah dan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan. Berikut pengaturan pasal-pasal tersebut

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*

Dalam rangka mewujudkan sanksi dan penghukuman yang efektif bagi pelaku tindak kejahatan *white collar crime* atau kejahatan

kerah putih, maka harus diperhatikan beberapa syarat/hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya suatu perubahan dan reformasi yang spesifik;
- b. Tindakan manajerial yang nyata dan kasat mata;
- c. Penegakan hukum;
- d. Bentuk penghukuman yang keras dan terpublikasikan kepada masyarakat luas bagi setiap terdakwa pelaku tindak kejahatan *white collar crime*.

Di atas sudah disebutkan tentang pembagian *white collar crime* oleh beberapa ahli, untuk setiap bentuk-bentuk *white collar crime* itu maka ada sanksinya sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya dan pada umumnya terdapat atau diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan khusus yang terdapat di luar KUHP. Ada hukuman untuk siapa saja yang melakukan kejahatan kerah putih, karena menentang adanya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10, ada hukuman seumur hidup yang siap untuk mengancam para pelaku tindakan *white collar crime* sebagai bentuk penegakan hukum.

Untuk kejahatan di kalangan pengusaha, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kelembagaan/korporasi, seperti suap-menyuap, berkolusi dengan penguasa, manipulasi pajak, persaingan curang, pemalsuan dokumen dan sebagainya nampaknya tidak ada perbedaan bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh yang bukan penguasa, namun tetap mendapatkan hukuman sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya.

Mengenai kejahatan jabatan, di dalam KUHP diatur dalam satu bab tersendiri yakni Bab XXXVIII Pasal 415 sampai dengan Pasal 436, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling cepat satu tahun empat bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Didalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

¹⁵ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 127

¹⁶ Dewantara Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa 'tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁷

Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan status sosial menengah ke atas, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam penyelenggaraan negara pantaslah para pelaku tindak pidana korupsi untuk di pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), juga pidana mati dapat dijatuhkan apabila perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2)).

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ini merupakan ancaman hukuman paling tinggi dari antara bunyi Pasal 3 tentang 'penyalahgunaan kewenangan' yang di pidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pasal 5 tentang 'memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara' yang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 6 tentang 'memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidan denda

paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 7 tentang 'pemborong, orang yang bertugas mengawasi bangunan, an meyerahkan barang keperluan TNI atau Polisi RI' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 8 tentang pegawai negeri arang selain pegawai negeri yang ditunjuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 9 tentang 'pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus dengan sengaja melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sidikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 10 tentang 'pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapka, menghancurkan, merusakkan barang, akta, surat atau daftar' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Pasal 11 tentang 'pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji" di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan Pasal 12 tentang 'pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat dan lain-lain yang menerima hadiah atau janji, meminta

¹⁷ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 494.

atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, menggunakan tanah negara, dengansengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan' di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesional juga mendapat tempat di dalam KUHP di samping ketentuan di luar KUHP yang berupa kode etik dari masing-masing profesi, seperti profesi pengacara, profesi dokter yang terdapat dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, profesi hakim di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, profesi wartawan dan profesi-profesi lainnya walaupun masih belum memadai.¹⁸

Bagi seorang dokter akan mendapatkan ancaman pidana penjara lebih berat yaitu ditambah sepertiga dari ancaman pidana apabila dokter melakukan aborsi dan euthanasia dan menyebabkan orang tersebut mati atau luka berat, dimana ancaman pidana penjaranya antara 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun apabila orang tersebut luka berat dan 15 (lima belas) tahun apabila orang tersebut meninggal dunia.

Kejahatan profesi yang dilakukan oleh profesi pengacara diatur dalam Pasal 420 KUHP ayat (1) angka 2 dan ayat (2) yang berbunyi:¹⁹

- (1) Di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun:
 2. barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
- (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya di pidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam pasal di atas jelas bahwa pengacara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun, bahkan jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar maka akan dikenakan pidana penjara 12 (dua belas) tahun.

Mengenai kejahatan profesi yang dilakukan oleh wartawan, KUHP tidak mengatur secara spesifik, namun ada beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap wartawan yang dalam hukum pidana dikenal dengan 'delik pers'. Pasal-pasal tersebut adalah:²⁰

- 1) Pasal 153 KUHP: Penyiaran penawaran bantuan untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Pasal 137 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Pasal 155 KUHP: Penyiaran pernyataan permusuhan terhadap golongan pemerintah;
- 4) Pasal 157 KUHP: Penyiaran pernyataan permusuhan terhadap rakyat;
- 5) Pasal 161 KUHP: Penghasutan;
- 6) Pasal 144 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap kepala negara sahabat;
- 7) Pasal 208 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap penguasa umum;
- 8) Pasal 282 KUHP: Penyiaran yang melanggar kesusilaan;
- 9) Pasal 310 KUHP: Penyiaran penghinaan terhadap seseorang.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku *white collar crime* sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelakunya mempunyai tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus ditujukan agar seseorang yang mempunyai niat jahat supaya menimbang-nimbang resiko pidana yang akan diterimanya. Sedangkan prevensi umum, mempunyai tujuan agar orang tidak melanggar aturan hukum. Penjatuhan sanksi terhadap kasus-kasus tertentu membuat orang berpikir bahwa sanksi itu dapat juga diberlakukan terhadap mereka apabila mereka melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu prevensi umum mengandung pengaruh moral dan pendidikan sosial.

¹⁸ Hanafi, *Op-Cit*, hlm. 29

¹⁹ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 141.

²⁰ Hanafi, *Loc-Cit*, hlm. 29.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam *white collar crime* atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (*white collar crime*) itu banyak jenisnya antara lain: Korupsi; Penyuapan; Penghindaran/penggelapan Pajak; Penipuan dan Terorisme.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku *white collar crime* adalah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yang pada umumnya terdapat pengaturannya di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat di luar KUHP. Apabila kejahatan korupsi maka akan ditindak sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Apabila kejahatan profesi akan diterapkan UU No. 29 Tahun 2004 untuk profesi dokter, UU No. 48 Tahun 2009 untuk profesi Hakim, KUHP untuk profesi Pengacara dan Wartawan, kejahatan individual sesuai dengan KUHP.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap pembahasan skripsi ini bahwa *white collar crime* yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasar, orang-orang yang mempunyai status kehidupan kelas menengah ke atas, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi seharusnya mendapatkan hukuman yang tinggi atau berat sebab mereka melakukan suatu kejahatan dengan sadar dan sengaja dan benar-benar mengetahui akibatnya serta menghendaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsalam R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997

- Agung Dewantara Nanda, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Arsyad Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edition VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.
- Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008
- Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Eleanora Fransiska Novita, *White Collar crime Hukum Dan Masyarakat*, Jurnal Online Universitas Esa Unggul, diakses dari <https://ejurnal.esaunggul.ac.id> pada tanggal 25 Agustus 2019.
- Effendy Marwan, *Korupsi dan Startegi Nasional, Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, 2013
- Firdausi Firma dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia, Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Reformasi: E-ISSN 2407-6864-vol.6, No. 1.2016
- Hanafi, *Politik Kriminal Terhadap White Collar Cime*, diakses dari www.researchgate.net pada tanggal 24 Agustus 2019
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Poerdarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003

- Pengertian Menurut Ahli*, diakses dari www.pengertianmenurutparaahli.net pada tanggal 21 Juli 2019
- Pengertian, Faktor dan Karakter White Collar Crime*, diakses dari materi hukum.com pada tanggal 23 Agustus 2019.
- Penyuapan, Tindakan Pelanggaran Hukum*, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 dari d.m.wikipedia.org
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Rahayu Siti Kurnia dalam Dian Sihombing, *Penghindaran Pajak Tax Avoidance dan Tax Evasion*, diakses dari www.academia.edu pada tanggal 24 Agustus 2019
- Santi Dwita Komala, *Kejahatan Keras Putih (white Collar crime) di Asia*, diakses dari medium.com pada tanggal 18 Agustus 2019.
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Sutoyo Johannes dan Adrianus Meliala, *Politik Kejahatan Terhadap Pelaku white Collar Crime*, Jurnal Ilmu-Ilmu sosial, Gramedia, Jakarta, 1994
- Tax evasion*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 24 Agustus 2019 UU No. 11 Tahun 1980 tentang *Tindak Pidana Suap*.
- UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Suap
- van Bemmelen JM, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1984. *What's is Bribery, Black's Law Dictionary*, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019